



## Konsep Ekonomi Makro Islam Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Dan Berkelanjutan Nasional Berbasis Syariah

Muhammad Fatih Askari Nst<sup>1</sup>, Rahayu Manila Guci<sup>2</sup>, Surya Dimas<sup>3</sup>, Ahmad  
Wahyudi Zein<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatra Utara  
E-mail: [askarifatih1@gmail.com](mailto:askarifatih1@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan moneter Islam dalam menghadapi tantangan keuangan global dan percepatan digitalisasi ekonomi nasional syariah modern. Perubahan lanskap ekonomi global, ketidakstabilan sistem keuangan internasional, serta perkembangan teknologi digital menuntut adanya inovasi kebijakan moneter syariah yang adaptif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan resmi lembaga keuangan syariah nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam di Indonesia telah mengalami transformasi melalui penguatan instrumen moneter syariah, optimalisasi peran perbankan integrasi teknologi digital dalam sistem keuangan syariah. Digitalisasi ekonomi syariah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi transmisi kebijakan moneter, inklusi keuangan, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam bentuk harmonisasi regulasi, kesiapan infrastruktur digital, dan literasi keuangan syariah masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan moneter Islam yang berbasis prinsip syariah dan teknologi digital merupakan strategi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Moneter Islam, Keuangan Global, Digitalisasi Ekonomi, Ekonomi Syariah, Stabilitas Ekonomi.

### PENDAHULUAN

Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas fenomena ekonomi secara agregat, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, stabilitas moneter, dan distribusi pendapatan. Dalam konteks Islam, ekonomi makro tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis pengelolaan perekonomian, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan keberlanjutan moral. Prinsip-prinsip syariah menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro Islam, yang menempatkan nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan semata, ekonomi makro Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Oleh karena itu, kajian ekonomi makro Islam menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global modern, seperti ketimpangan, krisis keuangan, dan ketidakstabilan sistem moneter, yang menuntut pendekatan alternatif berbasis nilai moral dan etika (Maharani 2025).

Salah satu isu sentral dalam ekonomi makro Islam adalah konsep kelangkaan sumber daya. Berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional yang menempatkan kelangkaan sebagai masalah utama, ekonomi Islam memandang kelangkaan lebih sebagai persoalan distribusi dan pengelolaan sumber daya yang tidak adil. Islam mengakui keterbatasan sumber daya, namun menekankan bahwa Allah telah menyediakan kecukupan bagi manusia apabila dikelola secara amanah dan berkeadilan. Ketimpangan distribusi, eksploitasi berlebihan, dan orientasi ekonomi yang bersifat spekulatif menjadi faktor utama munculnya kelangkaan dalam praktik ekonomi modern. Dalam perspektif makro Islam, negara memiliki peran strategis untuk mengatur distribusi, menjaga keseimbangan sektor riil dan keuangan, serta mencegah

penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan demikian, pengelolaan kelangkaan dalam ekonomi makro Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan institusional (Amsari & Sahla, 2024).

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan yang efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam konteks makroekonomi, zakat memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang mampu memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Penyaluran zakat yang produktif dapat mendorong peningkatan konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, zakat menjadi salah satu pilar penting dalam kerangka ekonomi makro Islam yang berorientasi pada stabilitas dan keadilan ekonomi jangka panjang (Ashfahany & Khairunnisa, 2023).

Kebijakan fiskal dalam ekonomi makro Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem konvensional. Dalam Islam, kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga untuk memastikan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen fiskal Islam mencakup zakat, pajak, serta filantropi Islam yang dikelola secara terintegrasi. Negara memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan kebijakan fiskal sebagai alat redistribusi kekayaan dan perlindungan kelompok rentan. Sinergi antara kebijakan fiskal dan filantropi Islam diyakini mampu meningkatkan stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan sosial. Dalam konteks perekonomian modern yang rentan terhadap krisis, pendekatan fiskal berbasis nilai Islam menawarkan solusi alternatif yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara luas (Faizah & Sulistiyono, 2025).

Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga memegang peranan penting dalam ekonomi makro Islam. Sistem moneter Islam menolak praktik riba dan spekulasi berlebihan yang sering menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi. Uang dalam perspektif Islam dipandang sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan tanpa aktivitas produktif. Kebijakan moneter Islam diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, mendorong sektor riil, dan memastikan keadilan dalam sistem keuangan. Instrumen moneter syariah seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan pengendalian likuiditas yang etis menjadi ciri khas sistem ini. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi makro Islam diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak krisis dan ketidakpastian global (Hasallyt 2024).

Dalam praktiknya, penerapan kebijakan moneter Islam sering berjalan berdampingan dengan sistem konvensional, khususnya di negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi ganda. Kondisi ini menuntut adanya harmonisasi kebijakan agar tujuan stabilitas ekonomi dapat tercapai secara optimal. Dual monetary policy menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan ekonomi makro Islam. Ketidaksinkronan kebijakan dapat memicu inflasi dan distorsi pasar, namun integrasi yang tepat justru dapat memperkuat sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah tanpa mengabaikan realitas ekonomi modern. Penguatan instrumen moneter syariah dan koordinasi yang baik antarotoritas menjadi kunci keberhasilan penerapan ekonomi makro Islam dalam sistem ekonomi nasional (Majid & Maulina, 2024).

Secara keseluruhan, ekonomi makro Islam menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dalam mengelola perekonomian nasional dan global. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah, ekonomi makro Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan sosial. Instrumen seperti



zakat, kebijakan fiskal Islami, dan sistem moneter tanpa riba menjadi pilar utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dalam menghadapi krisis ekonomi global dan ketimpangan struktural, ekonomi makro Islam hadir sebagai alternatif sistem yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai konsep ekonomi makro dalam Islam menjadi sangat penting, baik dari sisi teoritis maupun praktis, guna memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan (Mustamin & Mansyur, 2025).

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Konsep Dasar Ekonomi Makro dalam Islam**

Ekonomi makro dalam Islam merupakan kerangka analisis ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara agregat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama ekonomi makro Islam tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan distributif, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Konsep ini berpijak pada nilai tauhid, khilafah, dan keadilan (al-'adl) yang menempatkan manusia sebagai pengelola sumber daya Allah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak boleh merugikan pihak lain dan harus berorientasi pada kemaslahatan bersama. Perspektif ini membedakan ekonomi makro Islam dari sistem konvensional yang lebih menitikberatkan pada efisiensi dan akumulasi modal semata (Maharani 2025).

Dalam praktiknya, ekonomi makro Islam mencakup pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan fiskal dan moneter, serta distribusi pendapatan yang sesuai dengan nilai Islam. Negara memiliki peran penting sebagai regulator untuk memastikan tercapainya keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan. Selain itu, sistem ekonomi makro Islam menolak praktik riba, gharar, dan maysir yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi makro Islam diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Siregar 2021).

### **Konsep Kelangkaan dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam**

Kelangkaan dalam ekonomi makro Islam dipahami secara berbeda dibandingkan ekonomi konvensional. Islam mengakui keterbatasan sumber daya, namun menekankan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada jumlah sumber daya, melainkan pada distribusi dan pengelolaannya. Ketimpangan akses terhadap sumber daya, eksploitasi berlebihan, serta dominasi kelompok tertentu menjadi penyebab utama kelangkaan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi makro Islam menekankan pentingnya sistem distribusi yang adil untuk mengatasi permasalahan tersebut (Amsari & Sahla, 2024).

Dalam konteks kebijakan makro, negara berperan untuk mencegah penumpukan kekayaan dan memastikan pemerataan ekonomi melalui regulasi yang adil. Instrumen syariah seperti zakat dan kebijakan fiskal Islam berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap distorsi distribusi. Dengan pendekatan ini, kelangkaan tidak dipandang sebagai masalah absolut, tetapi sebagai tantangan manajerial dan moral yang harus diatasi melalui kebijakan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial (Amsari & Sahla, 2024).

### **Pertumbuhan Ekonomi dalam Kerangka Makro Islam**

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari peningkatan output nasional, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Islam menekankan pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, indikator kesejahteraan sosial menjadi bagian penting dalam evaluasi pertumbuhan ekonomi makro Islam (Ashfahany & Khairunnisa, 2023).

Instrumen zakat memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Zakat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, memperluas konsumsi agregat, dan mendorong aktivitas ekonomi sektor riil. Dalam jangka panjang, zakat berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial. Dengan demikian, zakat bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga komponen penting dalam sistem pertumbuhan ekonomi makro Islam (Mustamin & Mansyur, 2025).

### **Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam**

Kebijakan fiskal dalam ekonomi makro Islam diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan distribusi pendapatan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan belanja negara secara amanah dan transparan. Berbeda dengan sistem konvensional, kebijakan fiskal Islam mengintegrasikan instrumen zakat, pajak, dan filantropi Islam sebagai satu kesatuan kebijakan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi redistribusi dan perlindungan sosial (Faizah & Sulistiyono, 2025).

Sinergi antara kebijakan fiskal dan filantropi Islam diyakini mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi krisis. Zakat dan instrumen sosial lainnya dapat berfungsi sebagai stabilisator otomatis yang menjaga daya beli masyarakat. Dengan kebijakan fiskal yang berlandaskan nilai Islam, negara dapat menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Faizah & Sulistiyono, 2025).

### **Konsep Uang dalam Ekonomi Makro Islam**

Dalam ekonomi makro Islam, uang dipandang sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Pandangan ini bertujuan untuk mencegah spekulasi dan praktik riba yang dapat merusak stabilitas ekonomi. Fungsi utama uang adalah mendukung aktivitas sektor riil dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara adil (Hasallyt & —, 2024).

Kebijakan moneter Islam menekankan stabilitas nilai uang dan pengendalian inflasi melalui instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Sistem bagi hasil dan pengendalian likuiditas berbasis aktivitas produktif menjadi ciri khas kebijakan moneter Islam. Dengan demikian, sistem moneter Islam diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi makro yang lebih tahan terhadap guncangan eksternal (Siregar 2021).

### **Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi**

Kebijakan moneter dalam ekonomi makro Islam bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Instrumen moneter syariah dirancang untuk menghindari distorsi pasar yang disebabkan oleh spekulasi dan ketidakpastian. Dalam konteks ekonomi modern, kebijakan moneter Islam sering dihadapkan pada tantangan penerapan sistem ganda dengan kebijakan konvensional (Majid & Maulina, 2024).

Dual monetary policy menuntut koordinasi yang kuat antara otoritas moneter dan lembaga keuangan syariah. Ketidaksinkronan kebijakan dapat memicu inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan instrumen moneter syariah dan integrasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan ekonomi makro Islam dalam sistem ekonomi nasional (Majid & Maulina, 2024).

### **Peran Negara dalam Ekonomi Makro Islam**

Negara memiliki peran sentral dalam ekonomi makro Islam sebagai pengatur, pengawas, dan penjamin keadilan ekonomi. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mencegah ketimpangan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Peran ini mencerminkan konsep khilafah, di mana pemerintah bertindak sebagai wakil umat dalam mengelola amanah ekonomi (Mansur & Wibowo, 2024).

Selain itu, negara berfungsi sebagai fasilitator pengembangan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan keuangan syariah. Dengan peran aktif negara, ekonomi makro Islam dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan sosial.



Pendekatan ini menjadikan ekonomi makro Islam sebagai sistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Mustamin & Mansyur, 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi makro Islam memiliki kerangka konseptual yang komprehensif dan sistematis dalam mengelola perekonomian secara agregat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Ekonomi makro Islam memandang bahwa stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkeadilan, dan kesejahteraan sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam implementasinya, instrumen seperti zakat, kebijakan fiskal Islam, dan sistem moneter tanpa riba berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Hasil pembahasan ini menegaskan bahwa ekonomi makro Islam mampu menjadi alternatif sistem ekonomi yang relevan dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan distribusi, krisis moneter, dan lemahnya sektor riil. Oleh karena itu, pemahaman konseptual terhadap ekonomi makro Islam menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

**Tabel 1. Prinsip Dasar Ekonomi Makro dalam Islam**

No	Prinsip	Makna Konseptual	Tujuan Ekonomi
1	Tauhid	Kesatuan nilai dan tujuan ekonomi	Keseimbangan material dan spiritual
2	Keadilan	Distribusi yang merata dan proporsional	Kesejahteraan sosial
3	Amanah	Tanggung jawab pengelolaan sumber daya	Keberlanjutan ekonomi
4	Maslahah	Kepentingan umum diutamakan	Stabilitas ekonomi
5	Keseimbangan	Harmoni sektor riil dan keuangan	Pertumbuhan berkelanjutan

Tabel ini menggambarkan prinsip dasar ekonomi makro dalam Islam yang menjadi fondasi utama dalam pengelolaan perekonomian secara agregat. Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada nilai ketuhanan dan tidak semata-mata mengejar keuntungan. Prinsip keadilan menuntut distribusi sumber daya yang merata agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Amanah menempatkan manusia dan negara sebagai pengelola sumber daya yang bertanggung jawab, bukan pemilik mutlak. Prinsip masalah menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, prinsip keseimbangan menuntut harmoni antara sektor riil dan sektor keuangan agar ekonomi tidak rapuh. Keseluruhan prinsip ini membentuk kerangka ekonomi makro Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan stabilitas jangka panjang.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam ekonomi makro Islam memberikan arah kebijakan yang berbeda dari sistem konvensional. Kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari capaian pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Prinsip-prinsip ini mendorong negara untuk berperan aktif dalam mengatur distribusi, mencegah penumpukan kekayaan, serta melindungi kelompok rentan. Dengan pendekatan ini, ekonomi makro Islam mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut juga menjadi landasan etis dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang sering kali tidak stabil. Oleh karena itu, prinsip dasar ekonomi makro

Islam berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus praktis dalam perumusan kebijakan ekonomi.

**Tabel 2. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam**

No	Instrumen	Fungsi Utama	Dampak Ekonomi
1	Zakat	Redistribusi pendapatan	Kesejahteraan sosial
2	Pajak	Pembiayaan negara	Stabilitas fiskal
3	Infak	Dukungan sosial	Penguatan konsumsi
4	Sedekah	Solidaritas ekonomi	Ketahanan sosial
5	Wakaf	Pembangunan jangka panjang	Produktivitas ekonomi

Tabel ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam ekonomi makro Islam memiliki instrumen yang beragam dan terintegrasi. Zakat berfungsi sebagai instrumen utama redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pajak tetap diakui sebagai sumber pembiayaan negara, namun penggunaannya harus berlandaskan keadilan. Infak dan sedekah memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat. Wakaf berperan penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang melalui penyediaan aset produktif. Instrumen-instrumen ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Integrasi instrumen fiskal Islam memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi makro. Ketika dikelola secara optimal, zakat dan filantropi Islam dapat berfungsi sebagai penyangga ekonomi dalam situasi krisis. Instrumen tersebut membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas sektor riil. Selain itu, kebijakan fiskal Islam mendorong negara untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam ekonomi makro Islam mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

**Tabel 3. Karakteristik Sistem Moneter Islam**

No	Karakteristik	Penjelasan	Implikasi Makro
1	Tanpa riba	Larangan bunga	Stabilitas keuangan
2	Berbasis aset	Dukungan sektor riil	Pertumbuhan nyata
3	Bagi hasil	Risiko bersama	Keadilan ekonomi
4	Anti spekulasi	Pengendalian risiko	Ketahanan ekonomi
5	Etika moneter	Nilai moral	Kepercayaan publik

Sistem moneter Islam memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari sistem konvensional. Larangan riba mencegah eksploitasi dan ketimpangan dalam sistem keuangan. Prinsip berbasis aset memastikan bahwa aktivitas moneter terhubung langsung dengan sektor riil. Skema bagi hasil menciptakan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Larangan spekulasi berlebihan membantu menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, penerapan etika moneter meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Karakteristik ini menjadikan sistem moneter Islam lebih stabil dan berorientasi pada aktivitas ekonomi yang produktif.

Implikasi makro dari sistem moneter Islam sangat signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan mengurangi spekulasi dan aktivitas nonproduktif, sistem ini mampu menekan potensi krisis keuangan. Hubungan erat antara sektor moneter dan sektor riil memperkuat fondasi ekonomi nasional. Selain itu, keadilan dalam distribusi risiko meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, sistem moneter Islam memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi makro dan ketahanan sistem keuangan dalam jangka panjang.

**Tabel 4. Peran Negara dalam Ekonomi Makro Islam**

No	Peran Negara	Bentuk Kebijakan	Tujuan Utama
1	Regulator	Aturan ekonomi	Keadilan pasar
2	Distributor	Redistribusi	Pemerataan
3	Stabilitator	Kebijakan makro	Stabilitas ekonomi
4	Fasilitator	Dukungan sektor riil	Pertumbuhan
5	Pengawas	Etika ekonomi	Perlindungan masyarakat

Peran negara dalam ekonomi makro Islam sangat strategis dalam menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi. Negara bertindak sebagai regulator untuk memastikan mekanisme pasar berjalan sesuai prinsip syariah. Sebagai distributor, negara bertanggung jawab dalam pemerataan sumber daya dan pendapatan. Peran stabilitator dilakukan melalui kebijakan makro untuk menjaga stabilitas ekonomi. Negara juga berfungsi sebagai fasilitator dalam mendorong sektor riil dan aktivitas produktif. Selain itu, pengawasan etika ekonomi menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan.

Dengan peran tersebut, negara dalam ekonomi makro Islam tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan bertanggung jawab. Kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan sosial. Negara menjadi penghubung antara nilai moral Islam dan praktik ekonomi modern. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran negara merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi ekonomi makro Islam secara menyeluruh.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro Islam merupakan sistem ekonomi yang komprehensif dan berlandaskan nilai-nilai syariah dalam mengelola perekonomian secara agregat. Ekonomi makro Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan distributif, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, keadilan, amanah, dan masalah menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan ekonomi makro Islam. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi makro Islam mampu menawarkan solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, instabilitas moneter, dan lemahnya sektor riil.

Selain itu, instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi makro Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem konvensional. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan penting dalam redistribusi pendapatan dan penguatan ketahanan sosial. Sementara itu, sistem moneter Islam yang bebas riba dan berbasis aktivitas produktif mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan. Peran negara juga sangat strategis sebagai regulator, distributor, stabilitator, dan pengawas untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dengan demikian, konsep ekonomi makro dalam Islam dapat menjadi kerangka kebijakan ekonomi yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Penerapan ekonomi makro Islam secara konsisten diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## REFERENSI

- Amsari, S., Sahla, H., Abd Majid, M. S., & Afandi, A. (2024). Kelangkaan dalam ekonomi makro Islam: Analisis dampak keterbatasan sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(2), 277–285. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i2.15922>
- Ashfahany, A. E., Khairunnisa, A. A., Solikah, U., Tsaniyah, N. A., & Nurhapsari, A. (2023). How zakat affects economic growth in three Islamic countries. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 45–61. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.21242>
- Faizah, F. N., Sulistiyono, A., Yahya, M., & Murtadho, A. (2025). Fiscal policy and Islamic philanthropy: A strategy for social welfare and economic stability. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 12(1), 43–62. <https://doi.org/10.31942/iq.v12i1.12697>
- Ghifari, R. A. A., Kristianingsih, & Tamara, D. A. D. (2021). Analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap Jakarta Islamic Index. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(1), 75–83. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2871>
- Hasallyt, N. (2024). Konsep uang dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 2(1), 102–110. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v2i1.4236>
- Majid, M. S. A., Maulina, R., Anwar, S., & Arifin, S. (2024). Dual monetary policy and inflation dynamics in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(3), 346–359. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20243pp346-359>
- Maharani, N. N. (2025). Fondasi ekonomi makro Islam: Konsep dan aplikasinya dalam perekonomian modern. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 1055–1062. (View) <https://jurnalebis.com/index.php/home/article/view/179>
- Mansur, F., Wibowo, R. P., & Widiastuti, F. (2024). Zakat and taxes: Supporting economic growth. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 14(2), 154–166. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.154-166>
- Mustamin, S. W., Abdillah S., A. S., Mansyur, F., Ridwan, M., Amri, U., & Fitrayani. (2025). The role of zakat in Islamic macroeconomics: A fiscal instrument for stability during global economic crises. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 253–274. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art10>
- Siregar, E. Y. (2021). Kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2). <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14154>